

PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI TENTANG *ENTREPRENEURIAL GOVERNMENT*

Lambok Wesly Simangunsong

Program Magister Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Jl. Adi Sucipto Penfui-Kupang

Abstract: Perception Government Officials at Entrepreneurial Bureaucratic. The purpose of this study is to investigate and perception and attitudes shown on entrepreneurial bureaucratic government officials in the District Oebobo Kupang in East Nusa Tenggara Province. This research was conducted using qualitative research by trying to construct reality and understand its meaning. The data analysis technique used is the analysis of Miles and Huberman model data comprising data reduction, presentation of data, and conclusion. The results showed the perceptions and attitudes of bureaucratic officials Kupang District of Oebobo pretty good. Perception and their attitude is based on several aspects, namely age, years of service, rank, level of education and educational hierarchy, as well as the workload demands bureaucracy street level which serves as the spearhead of government as direct contact with the public.

Abstrak: Persepsi Pejabat Birokrasi tentang *Entrepreneurial Government*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap yang ditunjukkan pejabat birokrasi tentang entrepreneurial government di Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan persepsi dan sikap para pejabat birokrasi Kecamatan Oebobo Kota Kupang cukup baik. Persepsi dan sikap mereka ini didasari oleh beberapa aspek, yaitu umur, masa kerja, kepangkatan, tingkat pendidikan dan penjenjangan pendidikan, disamping tuntutan beban tugas sebagai *street level bureaucracy* yang berfungsi sebagai ujung tombak pemerintahan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kata Kunci: persepsi, sikap, *entrepreneurial government*, pejabat birokrasi

PENDAHULUAN

Model birokrat yang secara langsung berpengaruh pada gaya pemerintahan yang berjalan selama ini kurang responsif dan tidak peka terhadap tuntutan perubahan, aspirasi dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengakibatkan tingkat kepercayaan rakyat terus menurun terhadap integritas pemerintah. Begitu urgennya kesadaran dan pemahaman para pejabat birokrasi untuk mengetahui dan memahami berbagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan modern dan menjadikannya landasan berpijak untuk mengadakan reformasi birokrasi pemerintahan di semua tingkatan. Tingkat kepercayaan rakyat pada integritas pemerintahanpun mulai dipertanyakan dan menunjukkan gejala penurunan dengan banyaknya bentuk ekspresi ketidakpuasan rakyat seperti main hakim sendiri, demonstrasi, protes, kecaman, caci maki terhadap birokrasi pemerintah bahkan ada sebagian daerah berkeinginan untuk berpisah dari Indonesia.

Pemerintah Kota Kupang sudah saatnya mereposisi peranannya menjadi birokrasi publik

yang memiliki akuntabilitas, responsif, inovatif dan profesional serta berjiwa *entrepreneur*, dengan mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha menurut teori Osborne dan Gaebler. Bertolak dari latar belakang tersebut, betapa penting dan urgennya kesadaran dan pemahaman yang harus dimiliki oleh setiap pejabat untuk mengetahui dan memahami berbagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan modern dan menjadikannya sebagai landasan berpijak untuk mengadakan reformasi birokrasi pemerintahan di semua tingkatan, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang persepsi dari pejabat birokrasi dalam menerima dan memahami ide serta paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan untuk mereformasi birokrasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah untuk mewujudkan *good governance*.

Persepsi adalah suatu kegiatan kognitif dalam proses pembentukan pengetahuan. Beberapa konsep tentang persepsi yang dikemukakan oleh ahli. Krech dalam Zulfadli (1992) mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses

kognitif yang kompleks dan yang menghasilkan suatu gambar yang unik tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dari kenyataannya. Selanjutnya Krech dan Crutchfield dalam Rakhmat (1991) juga mengungkapkan bahwa ada dua faktor utama yang menjelaskan tentang persepsi yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Pertama faktor struktural berhubungan dengan kajian psikologi dan berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf. *Kedua*, faktor fungsional yaitu faktor personal yang berasal dari dalam diri individu seseorang yang diwujudkan dalam bentuk karakteristik pribadi.

Tahap terakhir dari proses persepsi ialah bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap. Hal ini dilakukan biasanya apabila seseorang berbuat sesuatu sehubungan dengan persepsinya. Misalnya seseorang dapat bertindak positif maupun negatif tergantung kepada baik dan buruk persepsi yang telah terbentuk tersebut. Tindakan ini bisa tersembunyi dan bisa terbuka. Tindakan tersembunyi berupa pembentukan pendapat dan sikap, sedangkan bentuk tindakan yang terbuka berupa tindakan nyata sehubungan dengan persepsi (Pareek, 1996).

Osborne dan Gaebler (1996) mencoba untuk menemukan kembali pemerintahan dengan mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha. Esensi dasar yang sangat strategis dari pemikiran Osborne dan Ted tersebut berkaitan erat dengan birokrasi pemerintahan yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik melainkan pada desentralisasi pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi. Fungsi pemerintahan yang modern strateginya harus diarahkan pada daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya lebih sering menggunakan mekanisme administratif daripada mekanisme pasar. Mekanisme administratif seringkali memiliki banyak kelemahan seperti mahal, lamban dan tidak berkualitas. Sebaliknya mekanisme pasar karena

sifatnya yang terbuka dan kompetitif cenderung lebih berhasil dalam menyediakan pelayanan yang murah, responsif dan inovatif. Orientasi terhadap pasar harus diikuti dengan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan alternatif sumber pelayanan dari masyarakat terutama kegiatan voluntir. Idenya di sini membangun keseimbangan antara birokrasi, pasar dan masyarakat (Dwiyanto, 1996).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap yang ditunjukkan pejabat birokrasi tentang *entrepreneurial government* di Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Data primer berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan dalam hal ini adalah Camat Oebobo, para Lurah se-Kecamatan Oebobo dan masyarakat pemerhati birokrasi. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan yang berhubungan dengan persepsi dan sikap pejabat birokrasi tentang ide-ide *entrepreneurial government*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi pejabat birokrasi dapat dijelaskan melalui umur, masa kerja, kepangkatan, tingkat pendidikan dan penjenjangan pendidikan dari pejabat dimaksud.

a. Umur; berdasarkan kelompok umur, terdapat sebanyak 16 (enam belas) orang berumur 30-40 tahun., 17 (tujuh belas) orang berumur 41-50 tahun dan 15 (lima belas) orang berumur 51-58 tahun, yang berdasarkan data penelitian bahwa para pejabat birokrasi seluruhnya berumur di atas 30 tahun dan berdomisili di ibukota Provinsi, dari seluruh pejabat birokrasi yang ada memiliki persepsi yang cu-

kup baik terhadap ide *entrepreneurial government* yang mereka dengar dan pahami melalui media massa, buku maupun lewat jalur pendidikan.

- b. Masa Kerja; berdasarkan masa kerja, dari 48 (empat puluh delapan) pejabat birokrasi terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun, dan berdasarkan data penelitian bahwa ke-37 pejabat dimaksud sudah mengetahui dan pernah mendengar tentang *entrepreneurial government* baik melalui media massa, buku-buku, diskusi sesama pegawai, pengarahan pimpinan serta melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi/pelatihan yang pernah dilaksanakan.
- c. Kepangkatan; berdasarkan kepangkatan, sebaran terbanyak berada pada golongan III-c dan III-d masing-masing sebanyak 19 (sembilan belas) orang, golongan III-d sebanyak 9 (sembilan) orang dan golongan IV-a sebanyak 1 (satu) orang. Beban tugas sebagai pejabat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga para pejabat termotivasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya tentang banyak hal terutama yang berkaitan dengan paradigma pemerintahan *entrepreneurial government*. Rata-rata para pejabat birokrasi cukup memahami ide *entrepreneurial government*.
- d. Tingkat Pendidikan dan Penjurusan Pendidikan; berdasarkan tingkat pendidikan, dimana ternyata masih terdapat 17 (tujuh belas) orang berpendidikan SLTA, 30 (tiga puluh) orang berpendidikan S-1 dan hanya 1 (satu) orang berpendidikan S-2, artinya terdapat sebanyak 35 % (berpendidikan SLTA) yang tidak mengetahui dan sisanya 65% sudah mengetahui *entrepreneurial government*. Selanjutnya berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat 1 (satu) orang yang sudah mengikuti Pim III dan 11 (sebelas) orang yang sudah mengikuti Pim IV, sedangkan 36 (tiga puluh enam) orang belum mengikuti Pim IV. Bagi yang sudah melaksanakan Pim III rata-rata sudah mengerti *entrepreneurial government* karena hal tersebut adalah salah satu materi pelajaran yang diajarkan. Sedangkan sebanyak 47 orang

(baik sudah maupun belum mengikuti Pim IV) belum mengetahui.

Selanjutnya persepsi dan sikap pejabat birokrasi tentang *entrepreneurial government* berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha Osborne dan Gaebler adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Katalis (Mengarahkan Ketimbang Mengayuh);
Berdasarkan observasi lapangan bahwa sampai dengan keadaan sekarang ini Pemerintah Kota Kupang belum pernah membuat kebijakan dalam program yang menganut prinsip pemerintahan katalis.
2. Pemerintahan Milik Masyarakat (Memberi Wewenang Ketimbang Melayani);
Pola pemerintahan yang dijalankan selama ini di Kota Kupang khususnya di Kecamatan Oebobo lebih cenderung melakukan kontrol terhadap masyarakat dari pada memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengontrol jalannya proses pelayanan publik.
3. Pemerintahan yang Kompetitif (Menyuntikkan Persaingan ke dalam Pemberian Pelayanan);
Pemerintah belum menyuntikkan semangat kompetisi pada tiap satuan kerja yang ada, hal ini disebabkan belum ada regulasi maupun kompetitor yang bisa memacu kompetisi. Yang hadir justru nuansa prosedur pelayanan publik yang bertingkat.
4. Pemerintahan yang Digerakkan Misi (Mengubah Organisasi yang Digerakkan Peraturan);
Prinsip ini mengamanatkan agar ada mekanisme untuk tidak mensakralkan peraturan seperti *sunset law* (undang-undang matahari terbenam) dan adanya *review commissions* (komisi peninjau) terhadap pembatasan waktu berlakunya sebuah peraturan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada implementasi riil yang telah dijalankan.
5. Pemerintahan Berorientasi pada Hasil;
Dari data yang dikumpulkan di lapangan, prinsip ini telah dijalankan, yaitu dengan penerapan sistem insentif berdasarkan pada kinerja dari dinas maupun kinerja pegawai.
6. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan;
Prinsip ini telah dijalankan dengan cukup

baik, yaitu ada mekanisme yang diatur oleh pemerintah untuk mendengarkan suara dan keluhan masyarakat. Hasil dari suara dan keluhan masyarakat kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan program.

7. Pemerintahan Wirausaha;
Pada prinsip ini pemerintah belum menjalankan karena sampai saat ini belum ada program atau terobosan yang bersifat wirausaha dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.
8. Pemerintahan yang Antisipatif;
Pemerintah yang antisipatif sudah dijalankan dengan penerapan manajemen strategis dalam kebijakan, program dan kegiatan seperti penyusunan rencana strategis di setiap unit organisasi.
9. Pemerintahan Desentralisasi;
Pemerintah sudah melakukan pengembangan organisasi yang lebih flat, matriks dan team work yang dilakukan pemda terutama dalam penyusunan struktur organisasi pemda.
10. Pemerintahan Berorientasi Pasar;
Pemerintah belum menjalankan kebijakan dan program yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan pasar. Yang terjadi adalah roda pemerintah berjalan apa adanya, jika masyarakat membutuhkan pelayanan, maka masyarakat yang datang dan mencari pelayanan, bukan pemerintah menyiapkan kebutuhan dan masyarakat tinggal memilih dan kemudian dilayani.

Ditemukan bahwa dari 10 prinsip pemerintahan *entrepreneurial government* oleh Osborne dan Gaebler hanya empat prinsip yang sudah diimplementasikan pemerintah Kota Kupang khususnya kecamatan Oebobo, yaitu pemerintahan berorientasi pada hasil, pemerintahan berorientasi pelanggan, pemerintahan yang antisipatif dan pemerintahan desentralisasi. Dari keempat prinsip ini menurut para pejabat birokrasi yang diwawancarai, sudah dijalankan dengan cukup baik. Pada masa datang tinggal diperluas dengan menerapkan 6 prinsip yang lain secara baik, agar *good governance* dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kota Kupang khususnya di Kecamatan Oebobo.

SIMPULAN

Persepsi dan sikap para pejabat birokrasi Kecamatan Oebobo Kota Kupang cukup baik. Persepsi dan sikap mereka ini didasari oleh beberapa aspek, yaitu umur, masa kerja, kepangkatan, tingkat pendidikan dan penjurangan pendidikan, disamping tuntutan beban tugas sebagai *street level bureaucracy* yang berfungsi sebagai ujung tombak pemerintahan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Oebobo baru melaksanakan empat prinsip *entrepreneurial government*, yaitu pemerintahan berorientasi pada hasil, pemerintahan berorientasi pelanggan, pemerintahan yang antisipatif, dan pemerintahan desentralisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bryson John M. 2001. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. 1997. "Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika", *JKAP*, 1 (2)
- Goodman, Jon, 1993, "Kewirausahaan dalam Perusahaan", *Manajemen*, No. 89
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. Addison Wesley Longman, Publishing Company Inc
- Osborne, David and David Plastrik, P. 1997. *Banishing Beureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison Wesley Publishing Company, Inc
- Sax, Gilbert, 2010, "*Principles of Education and Psychological Measurement and Evaluation*". Chicago: Concordia University
- Siropolis, Nicholas C. 1994. *Small Business Management: A Guide to Entrepreneurship*. Boston: Houghton Mifflin
- Zulfadli. 1992. "Persepsi Wirausahawan tentang Rencana Regulasi Perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Malang: FE Universitas Muhammadiyah.